

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER- /PJ/2015  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN  
KETERANGAN STATUS WAJIB  
PAJAK DALAM RANGKA  
KONFIRMASI STATUS WAJIB  
PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK  
TERTENTU PADA INSTANSI  
PEMERINTAH

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : .....1)  
Hal : Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak

Kepada Yth.  
Kepala KPP..... 2)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....3)

NPWP : .....4)

Jabatan : .....5)

Alamat : .....6)

Nomor Telepon : .....7)

Bertindak selaku :

Wajib Pajak

Wakil Wajib Pajak/Kuasa \*)

Dari Wajib Pajak

Nama : .....8)

NPWP : .....9)

Alamat : .....10)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari ..... 11) untuk layanan publik.....12).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., ..... 13)

..... 14)

\*) dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak
- Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat mengajukan permohonan Keterangan Status Wajib Pajak
- Angka 3 : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.  
Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 6 tidak perlu diisi.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 8 : Diisi nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8 tidak perlu diisi.
- Angka 9 : Diisi NPWP Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 9 tidak perlu diisi.
- Angka 10 : Diisi alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 10 tidak perlu diisi.
- Angka 11 : Diisi nama Instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik.
- Angka 12 : Diisi jenis layanan publik.
- Angka 13 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana tercantum dalam nomor 4.

---

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER- /PJ/2015  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN  
KETERANGAN STATUS WAJIB  
PAJAK DALAM RANGKA  
KONFIRMASI STATUS WAJIB  
PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK  
TERTENTU PADA INSTANSI  
PEMERINTAH

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP.....1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....2)

Jalan.....  
Telepon.....  
Email.....

---

Keterangan Status Wajib Pajak  
Nomor : .....3)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : .....4)  
NPWP : .....5)  
Alamat : .....6)  
Status : .....7)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada .....8) untuk  
layanan publik berupa .....9) tahun .....10).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....11)  
a.n. Kepala Kantor,  
Kepala Seksi Pelayanan

.....,..... 12)  
NIP .....

B. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : cukup jelas.
- Angka 2 : Cukup jelas.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor Keterangan Status Wajib Pajak
- Angka 4 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan status valid atau tidak valid
- Angka 8 : Diisi nama Instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik.
- Angka 9 : Diisi jenis layanan publik.
- Angka 10 : Diisi tahun Keterangan Status Wajib Pajak berlaku.
- Angka 11 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Keterangan Status Wajib Pajak diterbitkan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP.

---

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002